



**LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFOMATIKA  
KABUPATEN BADUNG**

**APBD KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
©2018**



# **^BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2)
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan

yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005.
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- (j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- (k) Peraturan Bupati Badung No. 32 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
- (l) Peraturan Bupati Badung No. 33 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
- (m) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2016

- (n) Peraturan Bupati Badung Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 65 Tahun 2017 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018
- (o) Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2017, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018
- (p) Peraturan Bupati Badung Nomor 41 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Kinerja

#### **Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV Kebijakan akuntansi**

- 4.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang adadalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Laporan Operasional

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.4. Neraca

5.5. Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya dibawah 75%

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Kesimpulan Penting tentang Laporan Keuangan

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

## **2.1. Ekonomi Makro**

Pemerintah Kabupaten Badung telah berhasil melakukan capaian kinerja secara akumulatif terhadap aspek-aspek yang sifatnya indikator makro ekonomi dan indikator sosial yang strategis. Adapun aspek capaian indikator makro ekonomi dan sosial meliputi : pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, IPM, kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat inflasi Kabupaten Badung selalu berada dibawah tingkat inflasi nasional. Kondisi ini menunjukkan kemampuan dan ketahanan perekonomian masyarakat Kabupaten Badung. Sedangkan untuk angka IPM Kabupaten Badung cukup tinggi diantara Kabupaten di Bali. Tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung dari tahun ke tahun menurun. Langkah-langkah yang telah ditempuh antara lain melaksanakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
  - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan.
  - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada.
  - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah.
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
  - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
  - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
  - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja

- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
  - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
  - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
  - c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun 2018 dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

#### **1. Visi dan Misi**

Sesuai dengan visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yakni :

##### **•Visi :**

Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan Tri Hita Karana Menuju Masyarakat yang maju,damai dan sejahtera.

##### **•Misi :**

1. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
3. Memperkuat pembangunan bidang pertanian,perikanan dan kelautan yang bersaing dengan kepariwisataan berbasis budaya.

#### **2. Tujuan dan Sasaran.**



Untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas, dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung maka tujuan dan Sasaran yang ditetapkan adalah :

- Tujuan :

1. Meningkatkan pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi.
2. Meningkatkan Pemberian Pelayanan kepada masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informasi.
3. Meningkatkan SDM sektor Komunikasi dan Informasi.

- Sasaran :

1. Terwujudnya pembangunan Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informasi sesuai kebutuhan.
2. Terwujudnya pelayanan kebutuhan masyarakat akan jasa komunikasi dan informasi yang andal, efektif dan efisien.
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia ( SDM ) sektor Komunikasi dan Informatika yang mampu dan terampil di bidangnya.
4. Terwujudnya peran serta masyarakat di bidang komunikasi dan komunikasi yang tertib, aman, lancar dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Terwujudnya aparatur dan masyarakat yang berbudaya informasi.
6. Terwujudnya pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi informasi secara efektif dan efisien.

3. Rencana Kerja :

Setelah ditetapkan Tujuan maupun Sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan / sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Perencanaan dan penganggaran SKPD ( Renja RKA )
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa.

5. Program Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi Media.
6. Program Pengelolaan Persandian Daerah.
7. Program Pengembangan Data/ Informasi/statistik,

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018.

Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2018 d

Uraian	Anggaran	R 2018	%
PENDAPATAN	0,00	12.407.951,00	0,00
BELANJA	150.613.670.106,00	53.863.531.490,81	35,76
SURPLUS/ (DEFISIT	150.613.670.106,00	53.851.123.539,81	35,75
PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00

Capaian pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00 Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
PAD	0.00	12.407.951,00	0.00
Jumlah	0.00	12.407.951,00	0.00

Komponen pendapatan asli daerah terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
Lain-Lain PAD yang sah	0.00	12.407.951,00	0.00
Jumlah	0.00	12.407.951,00	0.00

Capaian belanja sebesar 35,76% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut.

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tahun 2018

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2018	REALISASI 2018	%
		Rp	Rp	
	Belanja Tidak			
1.	Langsung	14,183,939,794.00	11,521,957,923.00	81.23
2.	Belanja Langsung	136,429,730,312.00	42,341,573,567.81	31.04
	Jumlah	150,613,670,106.00	53,863,531,490.81	35.76

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 sebesar Rp 11.521.957.923,00 atau sebesar 81,23 % dari anggaran Rp 14.183.939.794,00. Komponen Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
Belanja pegawai	14.183.939.794,00	11.521.957.923,00	81.23
jumlah	14.183.939.794,00	11.521.957.923,00	81.23

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran (Rp)	R 2018 (Rp)	%
Belanja gaji dan tunjangan	5.561.298.994,00	3.916.186.456,00	70,42
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.622.640.800,00	7.605.771.467,00	88,21
jumlah	14.183.939.794,00	11.521.957.923,00	81,23

Realisasi anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 sebesar Rp 42.341.573.567,81 atau 31,04 % dari anggaran Rp 136.429.730.312,00.

Komponen Belanja Langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
--------	----------	--------	---

Belanja pegawai	4.613.902.000,00	4.075.841.000,00	84.09
Belanja barang jasa	43.937.209.120,00	12.039.399.609,00	27.40
Belanja modal	87.878.619.192,00	26.226.332.958,81	29.84
jumlah	136.429.730.312,00	42.341.573.567,87	31.03

Komponen Belanja Pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
Honorarium PNS	522.040.000,00	487.360.00,00	93.36
Uang Lembur PNS	35.262.000,00	24.231.000,00	68.72
Honorarium PNS Pelaksana Kegiatan	3.861.000.000,00	3.384.250.000,00	87.65
Honorarium Pelaksana Kegiatan	195.600.000,00	180.000.000,00	92.02
Jumlah	4.613.902.000,00	4.075.841.000,00	84.09

Komponen Belanja Barang dan Jasa terdiri dari :

Uraian	Anggaran	R 2018	%
Belanja bahan pakai habis	841.713.288,00	678.096.500,00	80.56
Belanja Cetak dan Penggandaan	187.461.500,00	179.476.700,00	95.74
Belanja Jasa Kantor	36.803.491.000,00	7.028.775.218,00	19.10
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.300.000,00	114.931.176,00	57.96
Belanja Makanan dan Minuman	176.292.000,00	128.948.000,00	73.14
Belanja Perjalanan Dinas	1.173.100.000,00	1.146.044.815,00	97.69
Belanja Pemeliharaan	1.365.926.214,00	757.262.900,00	55.44

Belanja Bahan/Material	129.564.475,00	119.526.100,00	92.25
Belanja Premi Asuransi	274.147.560,00	56.517.000,00	20.62
Belanja Pakaian Kerja	34.546.000,00	32.965.000,00	95.42
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli	1.369.750.000,00	1.367.650.000,00	99.85
Belanja Jasa Konsultansi	1.319.217.083,00	411.256.200,00	31.17
Belanja Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	38.700.000,00	2.950.000,00	7.62
Uang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	15.000.000,00	75.00
Jumlah	43.937.209.120,00	12.039.399.609,00	27.40

Komponen Belanja Modal terdiri dari :

Uraian	Anggarnan	R 2018	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.386.119.192,00	25.929.602.808,81	29.67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.500.000,00	25.160.000,00	11.57
Belanja Modal Aset Tetap dan Lainnya	275.000.000,00	271.570.150,00	98.75
Jumlah	87.878.619.192,00	26.226.332.958,81	29.84

Belanja Langsung di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap Program Tahun 2018

No	Program	Aggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
		Rp.	Rp.	
1	Pelayanan Administrasi	2,004,694,368	1,413,440,105	70.51
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana	5,072,763,240	3,177,104,346	62.63
3	Pengembangan Peningkatan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	566,943,100	520,632,100	91.83
4	Perencanaan dan Penganggaran SKPD ( Renja ,RKA)	10,001,900	9,699,400	96.98
5	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media masa	128,188,070,804	36,665,247,016.81	28.60
6	Peningkatan kualitas pemahaman dalam penyerapan informasi media	34,922,500	32,145,300	92.05
7	Penelolaan Persandian Daerah	379,861,000	354,796,950	93.40
8	Pengembangan Data /informasi/Statistik Daerah	172,473,400	168,508,350	97.70
		136,429,730,312	42,341,573,567.81	31.04

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - Masukan dana : Rp. 461.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 114.522.375,-
  - Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi,Listrik,air dan Telepon pada Diskominfo dengan target kinerja 12 bulan.
  - Hasil : Terpenuhinya jasa komunikasi,listrik,air dan Telepon Dengan realisasi 24.90 %.
  - Sasaran : Diskominfo dan Kabupaten Badung.
- Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - Masukan dana : Rp 9.300.000,-
  - Realisasi : Rp. 7.821.580,-

- Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang disamsat dan KIR dengan target
- Hasil : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Oprasional SKPD/Unit,dengan realisasi sebesar 84.10 %.
- Sasaran : Kendaraan Dinas/Oprasionalpada Diskominfo KabupatenBadung.

### 3. Penyediaan jasa keuangan

- Masukan dana : Rp. 6.600.000,-
- Realisasi : Rp. 6.600.000,-
- Keluaran : Jumlah Penyediaan materai pada Dinas Kominfo
- Hasil : Tersedianyamaterai pada Diskominfo capaian 100%.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika Badung.

### 4. Penyediaan alat tulis kantor :

- Masukan dana : Rp. 34.999.888,-
- Realisasi : Rp. 33.275.950,-
- Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya alat tulis kantor 12 Bulan realisasi 95.08 %.
- Sasaran : Alat Tulis Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

### 5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan :

- Masukan dana : Rp. 29.999.900,-
- Realisasi : Rp. 28.106.200,-
- Keluaran : Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan yang memadai 12 bulan
- Hasil : Terwujudnya barang cetak dan penggandaan dengan target 12 bulan dengan realisasi sebsera 93.69 %.
- Sasaran : Barang Cetak dan Penggandaan Diskominfo Kabupaten Badung.

### 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor :

- Masukan dana : Rp. 23.000.500,-



- Realisasi : Rp. 21.490.000,-
- Keluaran : Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Kantor  
Yang memadaidengan target kinerja 1 paket.
- Hasil : Optimalnya fungsi instalasi listrik/ penerangan bangunkantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 1 paket dengan realisasi 93.44 %.
- Sasaran : Komponen Listrik/Penerangan bangunan Kantor Diskominfo Kabupaten Badung.

7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :

- Masukan dana : Rp. 82.410.000,-
- Realisasi : Rp. 82.410.000,-
- Keluaran : Terlaksananya kebutuhan bacaan pada Diskominfo
- Hasil : Tercapainya kebutuhan bahan bacaan pada Diskominfo  
Dengan realisasi 100%.
- Sasaran : Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman:

- Masukan dana : Rp. 32.772.000,-
- Realisasi : Rp. 16.418.000,-
- Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman pegawai dan Tamu  
dengan target kinerja 12 Bulan.
- Hasil : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman TamuDengan capaian kenerja 12 bulan, realisasi 50,10 %.
- Sasaran : Pegawai dan Tamu pada Diskominfo Kabupaten Badung.

9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah :

- Masukan dana : Rp. 425.000.000,-
- Realisasi : Rp. 424.266.800,-
- Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah dengan target kinerja 1 Paket/ 1 Tahun.

- Hasil : Terwujudnya Sinergi dan Koordinasi keluar daerah Dengan capaian kinerja 99.83 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

10. Kegiatan penyediaan dekorasi :

- Masukan dana : Rp. 85.750.000,-
- Realisasi : Rp. 84.550.000,-
- Keluaran : Tersedianya bahan sarana dekorasi Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan target kinerja 1 Paket.
- Hasil : Terwujudnya Keindahan dan Keserasian Kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 98.60 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

11. Penyediaan bahan bakar kendaraan :

- Masukan dana : Rp. 388.680.000,-
- Realisasi : Rp. 247.510.000,-
- Keluaran : Jumlah bahan bakar kendaraan/Oprasional yang tersedia Pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan targetkinerja 34.200 Liter/ 12 bulan.
- Hasil : Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 63.68 %.
- Sasaran : Kendaraan Dinas/ Operasional Diskominfo.

12. Kegiatan penyediaan upacara keagamaan :

- Masukan dana : Rp. 42.980.000,-
- Realisasi : Rp. 42.730.000,-
- Keluaran : Terlaksananya bahan upacara keagamaan pada Kabupaten Badung dengan target kinerja 12 bulan
- Hasil : Tersedianya upacara keagamaan pada Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 99.42 %.
- Sasaran : Sesajen/Aci-aci

13. Kegiatan Lomba Olah Raga / Kesenian pada hari-hari bersejarah :

- Masukan dana : Rp. 50.000.000,-
- Realisasi : Rp. 3.810.000,-

- Keluaran : Tersedianya pakaian dan konsumsi lomba dengan dengan targetkinerja 1 Paket.
- Hasil : Terlaksananya lomba olah raga dan kesenian, dengan capaian kinerja 7.62 %.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

14. Pelaksanaan Upakara Penganyaran ke Pura-pura Kahyangan Jagat:

- Masukan dana : Rp. 106.000.000,-
- Realisasi : Rp. 92.300.000,-
- Keluaran : TerlaksananyaUpakara Penganyaran terlaksananya Belanja Jasa Transportasi
- Hasil : Tersedianya upakara penganyaran ke Pura-Pura Khayangan Jagat dengan capaian kinerja 87.00 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga:

- Masukan dana : Rp. 21.143.200,-
- Realisasi : Rp. 21.143.200,-
- Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Yang Memadai
- Hasil : Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor dengan capaian kinerja 100 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung.

16. Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap:

- Masukan dana : Rp. 205.058.880,-
- Realisasi : Rp. 186.486.000,-
- Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak Yang Dibayarkan
- Hasil : Meningkatnya Konerja Tenaga Kontrak dengan capaian kinerja 91.00 %.
- Sasaran : Diskominfo Kabupaten Badung

**A. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :**

1. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor:

- Masukan dana : Rp. 944.074.800,-
- Realisasi : Rp. 687.543.000,-
- Keluaran : Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung

- Hasil : Tersedianya perlengkapan gedung kantor untuk Diskominfo Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 73.00 %.
  - Sasaran : Perlengkapan Gedung Kantor
2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor :
- Masukan dana : Rp. 1.429.317,740,-
  - Realisasi : Rp. 734.264.300,-
  - Keluaran : Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dengan target 53 unit
  - Hasil : Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 52.00 %.
  - Sasaran : Peralatan Gedung Kantor.
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor :
- Masukan dana : Rp. 5.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 0,00
  - Keluaran : Terpeliharanya Gedung Kantor, dengan target 1 Paket.
  - Hasil : Terwujudnya Gedung Kantor yang Representatif, capaian kinerja 0 %.
  - Sasaran : Bagian gedung/kantor yang rusak pada Diskominfo Kabupaten Badung.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Masukan dana : Rp. 189.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 107.109.596,-
  - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dengan target kinerja 35 kendaraan.
  - Hasil : Optimalnya fungsi kendaraan dinas /operasional dengan capaian kinerja 56.68 %.
  - Sasaran : Kendaraan dinas/Oprasional
5. Kegiatan Pemeliharaan perlengkapan kantor:
- Masukan dana : Rp. 31.800.000,-
  - Realisasi : Rp. 4.350.000,-
  - Keluaran : Tersedianya perlengkapan Gedung kantor, dengan target kinerja 96 unit

- Hasil : Optimalnya perlengkapan kantor pada Diskominfo Kabupaten Badung, dengan capaian kinerja 13.68 %.
  - Sasaran : Peralatan gedung kantor yang rusak pada Diskominfo Kabupaten Badung.
6. Kegiatan Pemeliharaan peralatan kantor:
- Masukan dana : Rp. 34.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 5.110.200,-
  - Keluaran : Terpeliharanya peralatan gedung kantor yang baik dengan target kinerja 1 Paket.
  - Hasil : Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan capaian kinerja 15.03 %.
  - Sasaran : Peralatan gedung kantor yang rusak pada Diskominfo
7. Monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo
- Masukan dana : Rp. 16.176.500,-
  - Realisasi : Rp. 15.395.500,-
  - Keluaran : Jumlah dokumen laporan monitoring dan dan Evaluasi pada Diskominfo, dengan target kinerja 20 buku.
  - Hasil : Terkendalinya kegiatan pada Diskominfo sesuai rencana dengancapaian kinerja 95.18 %
  - Sasaran : Seluruh kegiatan pada Diskominfo Kabupaten Badung.
8. Kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
- Masukan dana : Rp. 13.190.400,-
  - Realisasi : Rp. 10.461.600,-
  - Keluaran : Tersedianya Berita Acara PPHP, dengan target kinerja 40 berita acara
  - Hasil : Terlaksananya penerimaan/Pemeriksaan hasil pekerjaan dengan capaian kinerja 79.32 %.
  - Sasaran : Kinerja Diskominfo Kabupaten Badung
9. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional :
- Masukan dana : Rp. 1.760.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 1.341.300.000,-
  - Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4 dengan Target 26 Unit
  - Hasil : Tersedianya Kendaraan Roda 2 dan 4 dengan target Kinerja sebesar 76.21 %

- Sasaran : Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Badung
10. Pengadaan Sarana dan Prasaean Ruang Rapat Comand Center :
- Masukan dana : Rp. 375.203.800,-
  - Realisasi : Rp. 0.00
  - Keluaran : Jumlah Sarana Ruang Rapat yang representatif
  - Hasil : Sarana Ruang Rapat yang Representatif 4 dengan target Kinerja sebesar 00,00 %
  - Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung
11. Penataan Lobby Ruang PPID :
- Masukan dana : Rp. 75.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 73.750.000,-
  - Keluaran : Cakupan Penataan Sarana Ruang lobby PPID
  - Hasil : Penataan Lobby Ruang PPID dengan target Kinerja sebesar 98.34 %
  - Sasaran : Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Badung
12. Kegiatan Penataan Taman Lantai 3 Gedung Kominfo :
- Masukan dana : Rp. 200.000.000,-
  - Realisasi : Rp. 197.820.150,-
  - Keluaran : Cakupan penataan Taman Lantai 3 Gedung Kominfo
  - Hasil : Penataan Taman Lantai 3 Gedung Kominfo dengan target Kinerja sebesar 98.91 %
  - Sasaran : Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Badung

**B. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :**

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD :
- Masukan dana : Rp. 560.941.400,-
  - Realisasi : Rp. 514.798.600,-
  - Keluaran : Honorarium Pengelola dengan target kinerja 32
  - Hasil : Peningkatan Kegiatan Pada Dinas Kominfo dengan capaian kinerja 91.78 %
  - Sasaran : Pelaksana kegiatan pada Diskominfo.
2. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah :
- Masukan dana : Rp. 6.001.700,-
  - Realisasi : Rp. 5.833.500,-

- Keluaran : Jumlah dokumen AKIP dengan target kinerja 60 buku
- Hasil : Terukurnya Capaian kinerja dalam pelaksanaan tupoksi dengan capaian 97.20 %.
- Sasaran : Kinerja Diskominfo.

**C. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD ( Renja ,RKA )**

1. Penyusunan Perencanaan Dokumen SKPD

- Masukan dana : Rp. 10.001.900,-
- Realisasi : Rp. 9.699.400,-
- Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Kominfo
- Hasil : Terencananya Kegiatan Pada Dinas Kominfo ,dengan capaian kinerja 96.98 %

**E. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa :**

1. Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Internet/Internet di Kabupaten Badung

- Masukan dana : Rp. 6.347.889.489,-
- Realisasi : Rp. 5.670.334.100,-
- Keluaran : Presentase terpeliharanya tower dan infrastruktur Jaringan Internet/ Internet di Kabupaten Badung.
- Hasil : Optimalnya fungsi tower dan jaringan internet/internet di Kabupaten Badung capaian kinerja 89.33 %.
- Sasaran : Tower dan Infrastruktur Jaringan internet/internet di Kabupaten Badung.

2. Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung

- Masukan dana : Rp. 56.645.795.764,-
- Realisasi : Rp. 4.805.130.183,25,-
- Keluaran : Jumlah Akses Internet di Kabupaten Badung
- Hasi : Meningkatnya akses internet bagi aparatur negara dan masyarakat dengan capaian kinerja 8,48 %.

3. Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 1.098.587.500,-
- Realisasi : Rp. 1.059.111.300,-
- Keluaran : Jumlah terpeliharanya CCTV di KabupatenBadung dengan target 183 unit.

- Hasil : Berfungsinya CCTV di Kabupaten Badung secara optimal  
Dengan capaian kinerja 96.41 %.
  - Sasaran : Terpantaunya Keamanan Publik melalui CCTV di Kabupaten Badung.
4. Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada kawasan Strategis di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 15.018.519.371,-
  - Realisasi : Rp. 2.752.073.125,56,-
  - Keluaran : Tersedianya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kabupaten Badung dengan target 387 Kamera.
  - Hasil : Meningkatnya sarana pengamanan di kawasan strategis di Kabupaten Badung dengan hasil kinerja 18.32 %.
  - Sasaran : Kawasan strategis Kabupaten Badung yang belum terpasang CCTV
5. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Telekomunikasi/Informatika di Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 6.378.100,-
  - Realisasi : Rp. 6.015.700,-
  - Keluaran : Jumlah terkendalnya usaha warsel,warnet,warung CD/VCD dengan target 115 usaha
  - Hasil : Terkendalnya usaha warsel,warnet,warung CD/VCD dan sejenisnya di Kabupaten Badung capaian kinerja 94.32 %.
  - Sasaran : Pengusaha warsel,warnet,warung CD/VCD dan sejenisnya di Kabupaten Badung.
6. Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung :
- Masukan dana : Rp. 1.556.812.800,-
  - Realisasi : Rp. 114.297.900,-
  - Keluaran : Jumlah terbangunnya jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung
  - Hasil : Tersediannya Jaringan Internet/Internet yang Handal di Kawasan Puspem Badung dengan capaian kinerja 7.35 %.
  - Sasaran : Tersediannya Jaringan Internet yang Handal di Kawasan Puspem .



7. Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 289.639.500,-
- Realisasi : Rp. 284.668.000,-
- Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli yang Menangani Pengelolaan Data Center sebanyak 3 orang di Kabupaten Badung
- Hasil : Data Center di Kabupaten Badung Berfungsi Secara Optimal dengan capaian kinerja 98.29 %.
- Sasaran : Tersediannya Data Center di Kabupaten Badung .

8. Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung:

- Masukan dana : Rp. 1.706.835.340,-
- Realisasi : Rp. 1.588.792.550,-
- Keluaran : Prosentase Terbangunnya Sistem smart city Kabupaten Badung dengan target 1 paket
- Hasil : Terbangunnya Sistem smart city Kabupaten Badung Dengan capaian kinerja 93.09 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

9. Optimalisasi Pengembangan dan Penerapan Smart City di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 3.946.576.600,-
- Realisasi : Rp. 3.457.707.350,-
- Keluaran : Jumlah Kegiatan dlm rangka optimalisasi pengembangan smart city
- Hasil : Laporan pengembangan dan penerapan Smart city di Kabupaten Badung,dengan capaian kinerja 87.62 %.
- Sasaran : Dinas Kominfo.

10. Pemeliharaan WEB di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 133.398.300,-
- Realisasi : Rp. 100.361.350,-
- Keluaran : Jumlah WEB Kabupaten Badung yang terpelihara dengan target kinerja 1 paket
- Hasil : Tersebar nya Informasi melalui internet dg capaian 75.24 %
- Sasaran : Website Kabupaten Badung.

11. Pengelolaan Pusat Kendali di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 246.192.200,-
- Realisasi : Rp. 231.670.350,-

- Keluaran : Jumlah Pengelolaan Data Center sebanyak 10 orang di Kabupaten Badung
- Hasil : Terkelolanya Pusat Kendali Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 94.11 %.
- Sasaran : Pengelolaan Data Center di Kabupaten Badung .

12. Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 30.185.869.500,-
- Realisasi : Rp. 5.925.360.000,-
- Keluaran : Jumlah Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung
- Hasil : Tersedianya Peralatan Command Center di Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 19.63 %.
- Sasaran : Diskominfo Badung .

13. Pameran Pembangunan :

- Masukan dana : Rp. 187.464.700,-
- Realisasi : Rp. 166.265.650,-
- Keluaran : Jumlah Pameran Pembangunan Tahun 2018, dengan target kerja 1 paket.
- Hasil : Tersedianya informasi pembangunan di Kabupaten Badung dengan capaian kinerja 88.70 %.
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

14. Pameran Festival Budaya Pertanian Kabupaten Badung,

- Masukan Dana : Rp. 36.842.300,-
- Realisasi : Rp. 34.668.550,-
- Keluaran : Jumlah Pameran Festival Budaya Pertanian Th 2018 1 paket.
- Hasil : Tersebar nya Pembangunan di Kabupatenuapten Badung, dengan Kinerja 94.10%
- Sasaran : Masyarakat / pengunjung pameran.

15. Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi,

- Masukan Dana : Rp. 200.202.300,-
- Realisasi : Rp. 193.419.265,-
- Keluaran : Jumlah Laporan
- Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 96,62%
- Sasaran : Masyarakat

16. Pengelolaan Data dan Informasi Publik,

- Masukan Dana : Rp. 199.329.620,-
- Realisasi : Rp. 186.183.600,-
- Keluaran : Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Publik
- Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 93,41%
- Sasaran : Masyarakat

17. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik,

- Masukan Dana : Rp. 13.234.700,-
- Realisasi : Rp. 13.099.200,-
- Keluaran : Jumlah Sosialisasi
- Hasil : Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, dengan Kinerja 98,98%
- Sasaran : Peserta Sosialisasi

18. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas di Wilayah Pemerintah Kabupaten Badung,

- Masukan Dana : Rp. 6.368.900,-
- Realisasi : Rp. 5.674.700,-
- Keluaran : Jumlah Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas (Radio)
- Hasil : Meningkatnya Tertib Administrasi Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas (Radio), dengan Kinerja 89,10%
- Sasaran : Pengusaha Lembaga Penyiaran Swasta dan Komunitas

19. Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis Web (TI),

- Masukan Dana : Rp. 111.864.800,-
- Realisasi : Rp. 99.433.600,-
- Keluaran : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Binaan
- Hasil : Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dikembangkan dan diberdayakan, dengan kinerja 88,89%
- Sasaran : Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Badung

20. Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi,

- Masukan Dana : Rp. 82.817.520,-

- Realisasi : Rp. 77.881.100,-
  - Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Peninjauan ke Lapangan
  - Hasil : Terkendalinya pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, dengan kinerja 94,04%
  - Sasaran : Menara Telekomunikasi di Kabupaten Badung
21. Implementasi Sistem E-Kinerja Kabupaten Badung,
- Masukan Dana : Rp. 10.167.451.500,-
  - Realisasi : Rp. 9.893.397.093,-
  - Keluaran : Implementasi Sistem E-Kinerja Kabupaten Badung
  - Hasil : Implementasi Sistem E-Kinerja Kabupaten Badung, dengan kinerja 97,31%
  - Sasaran : PD di Kabupaten Badung

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman Dalam Penyerapan Infomasi Media

22. Literasi Media,
- Masukan Dana : Rp. 34.922.500,-
  - Realisasi : Rp. 32.145.300,-
  - Keluaran : Literasi Media yang Melibatkan Anak-Anak SMA se-Kabupaten Badung
  - Hasil : Meningkatnya pemahaman siswa mengenai tata pemanfaatan media secara sehat, dengan kinerja 92,05%
  - Sasaran : Siswa SMA di Kabupaten Badung
23. Penggandaan Buku Data Pembangunan Daerah Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 77.052.600,-
  - Realisasi : Rp. 74.773.000,-
  - Keluaran : Jumlah buku statistik Kabupaten Badung yang diadakan dengan target 750 buku.
  - Hasil : Tersebaranya informasi melalui pengadaan buku statistik Kabupaten Badung, capaian kinerja 97.05%.
  - Sasaran : Dinas Kominfo.
24. Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung :
- Masukan dana : Rp. 95.420.800,-
  - Realisasi : Rp. 93.735.350,-
  - Keluaran : Jumlah Buku Profil Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Dengan Target 150 Buku.

- Hasil : Tersedianya Profit Statistik Pembangunan Daerah Kabupaten Badung dengan capaian 98,24%.
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

25. Pengelolaan Teknis Persandiaan :

- Masukan dana : Rp. 208.795.500,-
- Realisasi : Rp. 192.455.000,-
- Keluaran : Terkelolanya Teknis Persandian
- Hasil : Teknis Persandian Terkelola dengan Baik capaian 92.18 %.
- Sasaran : Dinas Komunikasi dan Informatika

26. Pengelolaan Pengamanan Informasi Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 147.110.100,-
- Realisasi : Rp. 138.695.600,-
- Keluaran : Tersedianya Pengamanan Informasi Peralatan sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi.
- Hasil : Terbangunnya Pengamanan Informasi Peralatan Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi terkelola dengan baik capaian kinerja 94.28 %
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung,

27. Pelayanan Pusat Operasi Pengamanan Informasi dan Komuikasi :

- Masukan dana : Rp. 2.847.300,-
- Realisasi : Rp. 2.804.000,-
- Keluaran : Pelayanan Pusat Operasional Keamanan Informasi dan Komunikasi terjaga dengan baik.
- Hasil : Terwujudnya Pusat Operasi Pengamanan informasi dan Komunikasi, capaian kinerja 98.48 %.
- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

28. Kontra Pengindraan / Sterilsasi terhadap ruang kerja Pimpinan, Rumah Jabatan dan tempat kerja lainnya di Kabupaten Badung :

- Masukan dana : Rp. 21.108.100,00
- Realisasi : Rp. 20.842.350,00
- Keluaran : Prosentase terjaganya keamanan ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya
- Hasil : Terbangunnya keamanan informasi di ruang kerja pimpinan, rumah jabatan dan tempat kerja lainnya dengan capaian kinerja 98,75 %.

- Sasaran : Pemerintah Kabupaten Badung.

### **3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

Pada Umumnya kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak terlalu signifikan namun dalam capaian kinerja yang dihadapi terdapat beberapa kendala antara lain :

1. Tidak tepatnya jadwal pelaksanaan dilapangan dengan Anggaran Kas.
2. Untuk Belanja Bahan Bakar Minyak terjadi kelebihan nilai harga yang tertuang pada DPA, dimana harga dipasaran lebih rendah dari pada standar harga di DPA dan untuk volumenya sesuai dengan di DPA, sehingga target tidak tercapai.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana

### **3.3 Penjelasan belanja yang realisasi keuangannya di bawah 75 % :**

1. Tunjangan Tunjangan Umum pada Belanja Pegawai anggaran setelah perubahan Rp. 134.539.987,- realisasinya Rp. 90.525.000- (67,28%) direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pegawai.
2. Pembulatan Gaji anggaran setelah perubahan Rp. 192.384,- realisasinya Rp. 38.586,- (20.06 %) direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pegawai.
3. Tunjangan Jaminan Kecelakaan anggaran setelah perubahan Rp.11.158.950,- realisasinya Rp 6.199.263,- ( 55.55 %) kurang dari 75% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pegawai.
4. Tunjangan Jaminan Kematian anggaran setelah perubahan Rp.13.948.688,- realisasinya Rp.7.749.144,- ( 55.55%) kurang dari 75% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan pegawai.
5. Belanja telepon pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran setelah perubahan sebesar Rp 145.000.000,00 realisasinya Rp 3.959.289,00 (2,73%) kurang dari 75% dikarenakan sambungan telepon baru terpasang bulan Juni 2018 sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 5.000.000,00.
6. Belanja listrik pada kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran setelah perubahan sebesar Rp 316.000.000,00 realisasinya Rp 110.563.086,00 (34,99%) kurang dari 75% dikarenakan penggunaan listrik yang dibayar untuk tahun anggaran 2018 hanya tagihan listrik CCTV sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran Rp 120.000.000,00 (37,97% dari anggaran).

7. Belanja Jasa KIR pada kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional anggaran setelah perubahan sebesar Rp 300.000,00 terealisasi sebesar Rp 104.580,00 (34,86%) kurang dari 75% karena hanya dua mobil yang di-KIR.
8. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Sarana Mobilitas pada kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 5.980.000,00 realisasinya Rp 4.470.000,00 (74,75%) kurang dari 75% karena sesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan.
9. Belanja makan dan minuman tamu pada kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 32.772.000,00 terealisasi sebesar Rp 16.418.000,00 (50,10%) kurang dari 75% karena realisasi sesuai dengan kebutuhan tamu yang datang.
10. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Sarana Mobilitas pada kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Kendaraan, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 388.680.000,00 realisasinya Rp 247.510.000,00 (63,68%) kurang dari 75% karena adanya efisiensi harga dan bahan bakar untuk kendaraan dinas roda dua belum diamprah (kendaraan dinas roda dua belum di-SP2D-kan).
11. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada kegiatan Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 10.800.000,00 terealisasi sebesar Rp 360.000,00 (3,33%) kurang dari 75% karena kegiatan lomba yang diikuti hanya satu lomba yaitu lomba jegeg bagus antar PD di Pemerintah Kabupaten Badung dengan jumlah peserta dua orang.
12. Belanja Pakaian Lomba pada kegiatan Lomba-lomba Olahraga/ Kesenian pada Hari-hari Bersejarah anggaran setelah perubahan sebesar Rp 37.450.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.700.000,00 (37,04%) kurang dari 75% karena kegiatan lomba yang diikuti hanya satu lomba yaitu lomba jegeg bagus antar PD di Pemerintah Kabupaten Badung dengan jumlah peserta dua orang.
13. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap, anggaran setelah perubahan Rp 12.242.880,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
14. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan alat dapur pada kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran setelah perubahan Rp 2.250.000,00 realisasi sebesar Rp 1.450.000,00 (64,44%) kurang dari 75% karena sesuai dengan Penawaran Rekanan.

15. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor anggaran setelah perubahan Rp 401.074.800,00 realisasi Rp 168.223.000,00 (41,94%) kurang dari 75% karena adanya rasionalisasi anggaran sebesar Rp 231.670.000,00 atau sebesar 57,76% dari anggaran.
16. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video Film pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor anggaran setelah perubahan Rp 861.370.600,00 realisasi Rp 203.566.000,00 (23,63% ) kurang dari 75% karena Belanja Sound System untuk Ruang Rapat Lt.II, Sound System untuk Ruang Rapat Lt.III, Layar Monitor untuk Ruang Rapat Lt.III, LCD+Layar Proyektor sebesar Rp 533.515.500,00 belum bisa dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang) serta adanya adanya rasionalisasi anggaran sebesar Rp 96.000.000,00 atau 11,15% dari anggaran.
17. Belanja Pemeliharaan Kantor/Gedung/Bangunan pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor anggaran setelah perubahan Rp 5.000.000,00 realisasi Rp 0,00 (0,00%) kurang dari 75% karena adanya rasionalisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau 100% dari anggaran.
18. Belanja Perawatan Kendaraan bermotor pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan anggaran setelah perubahan Rp 189.000.000,00 realisasi sebesar Rp 107.109.596,00 (56,67%) kurang dari 75% karena pada kendaraan roda dua (dianggarkan sebanyak 20 unit) belum diperlukan perawatan jadi disesuaikan dengan kebutuhan.
19. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor anggaran setelah perubahan Rp 31.800.000,00 realisasi Rp 4.350.000,00 (13,68%) kurang dari 75% disesuaikan dengan kebutuhan.
20. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor - Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Kantor anggaran setelah perubahan Rp 34.000.000,00 realisasi Rp 5.110.200,00 (15,03%) kurang dari 75% disesuaikan dengan kebutuhan.
21. Belanja Cetak pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika, anggaran setelah perubahan Rp 475.000,00 realisasi Rp 325.000,00 (68,42%) kurang dari 75% karena adanya selisih harga.
22. Belanja Makanan dan Minuman pada Kegiatan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan anggaan setelah perubahan Rp 6.000.000,00 realisasi sebesar Rp 4.200.000,00 (70,00%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan kebutuhan.
23. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional anggaran setelah



perubahan Rp 380.000.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 kurang dari 75% karena Pengadaan Sepeda Motor sebanyak 20 unit senilai Rp 379.020.000,00 belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang).

24. Belanja Alat Tulis Kantor pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Centre di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 2.125.800,00 terealisasi Rp 0,00 kurang dari 75% karena kegiatan induk tidak dilaksanakan.
25. Belanja Foto Copy pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Centre di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 30.000,00 terealisasi Rp 0,00 kurang dari 75% karena kegiatan induk tidak dilaksanakan.
26. Belanja Penjilidan pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Centre di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 98.000,00 terealisasi Rp 0,00 kurang dari 75% karena kegiatan induk tidak dilaksanakan.
27. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Centre di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 182.950.000,00 terealisasi Rp 0,00 kurang dari 75% karena setelah dilakukan koordinasi dengan calon penyedia waktu pelaksanaan pekerjaan terlalu singkat, dikaitkan dengan pengiriman barang yang membutuhkan waktu lebih Panjang karena barang import.
28. Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Rapat Command Centre di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 190.000.000,00 terealisasi Rp 0,00 kurang dari 75% karena setelah dilakukan koordinasi dengan calon penyedia waktu pelaksanaan pekerjaan terlalu singkat, dikaitkan dengan pengiriman barang yang membutuhkan waktu lebih Panjang karena barang import.
29. Belanja Uang Lembur PNS pada Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran setelah perubahan Rp 35.262.000,00 terealisasi sebesar Rp 24.231.000,00 (68,72%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan jam kerja lembur.
30. Belanja Cetak pada Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah anggaran setelah perubahan Rp 190.000,00 realisasi sebesar Rp 130.000,00 (68,42%) karena adanya selisih harga.

31. Belanja Cetak pada Kegiatan Pemeliharaan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, anggaran setelah perubahan Rp 475.000,00 terealisasi sebesar Rp 325.000,00 (68,42%) karena adanya selisih harga.
32. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten Badung anggaran setelah perubahan Rp 24.655.800,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
33. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi pada kegiatan Pemeliharaan Tower dan Infrastruktur Jaringan Intranet/Internet di Kabupaten anggaran setelah perubahan sebesar Rp 740.126.214,00 realisasi sebesar Rp 192.836.300,00 (26,05%) kurang dari 75% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
34. Belanja Kawat/ Faksimili/ Internet/ Intranet/ TV pada Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung anggaran setelah perubahan Rp 29.119.200.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0,00%) kurang dari 75% karena belanja sebesar Rp 13.613.600.000,00 belum terbayar pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang). Disamping itu juga telah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp 6.383.800.000,00 atau 21,92% dari anggaran.
35. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pada Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 648.762.083,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0,00%) kurang dari 75% karena belanja jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp 647.119.000,00 belum terbayar pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang).
36. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 26.874.132.581,00 realisasi sebesar Rp 4.801.826.483,25 (17,87%) kurang dari 75% karena Belanja Modal Kegiatan Penyediaan Akses Internet baru terbayar sebesar uang muka sedangkan sisa nilai kontrak sebesar Rp 18.683.037.219,75 masuk daftar hutang Tahun 2019.
37. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pemeliharaan CCTV di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 34.400.400,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
38. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan pada kegiatan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 254.115.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00

(0,00%) kurang dari 75% karena belanja jasa konsultansi pengawasan sebesar Rp 242.472.450,00 belum terbayar pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang Tahun 2019).

39. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Keamanan pada Kegiatan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 14.762.144.071,00 realisasi sebesar Rp 2.749.864.125,56 (18,63%) kurang dari 75% karena Belanja Modal Kegiatan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada kawasan Strategis di Kabupaten Badung baru terbayar sebesar uang muka sedangkan sisa nilai kontrak sebesar Rp 11.105.186.061,21 masuk daftar hutang Tahun 2019.
40. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung, anggaran setelah perubahan Rp 1.439.000.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0,00%) kurang dari 75% karena Belanja Modal Kegiatan Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung sebesar Rp 1.396.656.459,00 belum terbayarkan pada Tahun Anggaran 2018 (masuk daftar hutang Tahun 2019).
41. Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada kegiatan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 40.158.000,00 realisasi sebesar Rp 11.700.000,00 (29,13%) kurang dari 75% Karena kegiatan induk tidak dilaksanakan.
42. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 87.544.440,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
43. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe pada Kegiatan Pemeliharaan Web Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan sebesar Rp 30.000.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0,00%) kurang dari 75% dikarenakan memerlukan pemeliharaan sehingga disesuaikan dengan kebutuhan.
44. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pengelolaan Pusat Kendali Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 14.388.000,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.

45. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 30.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp 5.739.360.000,00 (19,13%) kurang dari 75% karena Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Command Center dan Data Center baru terbayar sebesar uang muka sedangkan sisa nilai kontrak sebesar Rp 23.215.023.443,00 masuk daftar hutang Tahun 2019.
46. Belanja Materi Pameran/ Pawai pada Kegiatan Pameran Pembangunan, anggaran setelah perubahan Rp 26.000.000,00 realisasi sebesar Rp 19.095.000,00 (73,44%) kurang dari 75% dikarenakan adanya efisiensi harga.
47. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Publik, anggaran setelah perubahan Rp 11.301.120,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
48. Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis WEB (TI), anggaran setelah perubahan Rp 1.545.000,00 realisasi sebesar Rp 480.000,00 (31,07%) kurang dari 75% dikarenakan disesuaikan dengan undangan.
49. Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kegiatan Pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Komunikasi Masyarakat (KKIM) Berbasis WEB (TI), anggaran setelah perubahan Rp 12.600.000,00 realisasi sebesar Rp 6.900.000,00 (54,76%) kurang dari 75% dikarenakan disesuaikan dengan undangan.
50. Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Publik, anggaran setelah perubahan Rp 11.301.120,00 realisasi sebesar Rp 0,00 (0%) karena belum adanya Perda yang mengatur mengenai premi asuransi ketenagakerjaan bagi tenaga kerja non pegawai sehingga dilakukan rasionalisasi 100% dari anggaran.
51. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabupaten/TV Satelit pada Kegiatan Implementasi Sistem e-Kinerja Kabupaten Badung, anggaran setelah perubahan Rp 195.000.000,00 realisasi sebesar Rp 11.115.843,00 (5,70%) kurang dari 75% karena disesuaikan dengan tagihan.
52. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS pada Kegiatan Literasi Media, anggaran setelah perubahan Rp 4.800.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 (62,50%) kurang dari 75% karena karena salah penganggaran (nilai nominalnya lebih besar dari Standar Biaya masukan)

53. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS pada Kegiatan Literasi Media, anggaran setelah perubahan Rp 4.800.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 (62,50%) kurang dari 75% karena karena salah penganggaran (nilai nominalnya lebih besar dari Standar Biaya masukan)
54. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS pada Kegiatan Literasi Media, anggaran setelah perubahan Rp 4.800.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 (62,50%) kurang dari 75% karena karena salah penganggaran (nilai nominalnya lebih besar dari Standar Biaya masukan)
55. Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli PNS pada Kegiatan Literasi Media, anggaran setelah perubahan Rp 4.800.000,00 realisasi Rp 3.000.000,00 (62,50%) kurang dari 75% karena karena salah penganggaran (nilai nominalnya lebih besar dari Standar Biaya masukan)
56. Belanja Cetak pada Kegiatan Pengelolaan Teknis Persandian, anggaran setelah perubahan Rp 764.900,00 realisasi Rp 451.500,00 (59,03%) kurang dari 75% karena adanya efisiensi.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- **Basis Kas (*cash basis*) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas**

Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

- **Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca**

Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

##### **A. NERACA**

###### **I. ASET LANCAR**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

###### **I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal

dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **I.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **I.3. Belanja dibayar di muka**

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

### **I.4. Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

### **I.5. Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari

retribusi yang belum dilunasi.

#### **I.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

#### **I.7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

#### **I.8. Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

#### **I.9. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar



apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **II. ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

### **II.1. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

### **II.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah

pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

### **II.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

### **II.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi

perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku ) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

## **II.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

## **II.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

## **II.7. Akumulasi Penyusutan**

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31

Desember 2018 dihitung sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016.

### **III. ASET LAINNYA**

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

#### **III.1. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

#### **III.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak jud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai ninal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

### **I V. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **IV.1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

#### **IV.2 . Uang Muka Kas Daerah**

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

#### **IV.3. Pendapatan Ditangguhkan**

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

#### **IV.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya**

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

### **V. EKUITAS DANA**

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

### **V.1. EKUITAS DANA LANCAR**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

### **V.2 .EKUITAS DANA INVESTASI**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

## **B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

### **I. Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

### **II. Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas

: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

### **C. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan pelaporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, dan disajikan tepat waktu. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sbb:

#### **a. Pendapatan LO**

Pendapatan LO adalah Pendapatan Daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang diterima secara tunai maupun masih berupa piutang.

#### **b. Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan kondisi antara lain: Beban diakui sebelum pengeluaran kas, Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, dan beban diakui setelah pengeluaran kas. Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban atas beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya. Beban disajikan dalam Laporan Operasional disesuaikan dengan klasifikasi ekonomi yaitu

- Beban Operasi
- Beban Transfer
- Beban Non Operasional

- Beban Luar Biasa

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain

-Pengeluaran Beban tahun berkenaan

Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja

-Informasi lainnya yang dianggap perlu

c. Surplus/Defisit dari operasi

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos ini.

d. Kegiatan Non Operasional

e. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa

f. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah

g. Surplus/Defisit LO

Merupakan surplus/defisit Lo pada akhir periode pelaporan yang dipindahkan ke pelaporan perubahan ekuitas.

## **D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

##### **5.1.1 PENDAPATAN – LRA**

Jumlah Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2018 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesarRp. 12.407.951,- Sedangkan realisasi pendapatan



LRA tahun 2017 sebesar Rp. 14.791.424,11.

Perbandingan Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai Stándar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut :

Tabel 5.1.1 Realisasi Pendapatan LRA Per 31 Desember 2018 dan 2017

No	Uraian	Target setelah Angg. Perubahan 2018	Realisasi 2018		Realisasi 2017
			Rp	%	
a	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LRA	0.00	12,407,951.00	0	14,791,424.11
	J U M L A H	-	12,407,951.00	-	14,791,424.11

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah -LRA, target anggaran setelah perubahan 2018 sebesar Rp. 0, terealisasi sebesar Rp. 12.407.951,- sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2017 sebesar Rp. 14.791.424,11 Rincian atas Realisasi PAD – LRA tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a.	Lain-lain PAD yang sah. <u>LRA</u>	0.00	14.407.951,00	0.00	14.791.424,11
	* Belanja	150.613.670.106,00	53.863.531.490,81	35,76	27.475.141.649,00
	<b>BELANJA OPERASI</b>	62.735.050.914,00	27.637.198.532,00	44,05	19.475.056.178,00
	- Belanja Pegawai	14.219.201.794,00	11.546.188.923,00	81,20	9.556.756.699,00
	- Belanja Barang dan Jasa	48.515.849.120,00	16.091.009.609,00	33,17	9.918.299.479,00
	<b>BELANJA MODAL</b>	87.878.619.192,00	26.226.332.958,81	29,84	8.000.085.471,00
	- Blj Modal Peralatan dan Mesin	87.386.119.192,00	25.929.602.808,81	29,67	8.000.085.471,00
	- Blj Modal Gedung dan Bangunan	217.500.000,00	25.160.000,00	11.57	0.00
	- Blj Modal Aset Tetap Lainnya	275.000.000,00	271.570.150,00	98,75	0.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>(150.613.670.106,00)</b>	<b>(53.851.123.539,81)</b>	<b>35.75</b>	<b>(27.460.350.224,89)</b>

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah - LRA Tahun 2018.

Gambaran Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut :

- a.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0.00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 14.407.951,00 atau 0.00% sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 14.791.424,11

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA sebagai berikut :

Tabel 5.1.3 Realisasi Lian-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro - LRA	0.00	14.407.951,00	0.00	14.791.424,11
2	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	0.00	14.407.951,00	0.00	14.791.424,11

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** berupa

- a. **Jasa Giro Pemegang Kas** dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 14.407.951,00 atau 0,00 %. Mengalami penurunan dari tahun 2017 yang teralisasi sebesar Rp.14.791.424,11.

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2018

Tabel.5.1.4 Penerimaan Jasa Giro Tahun 2018 dan Tahun 2017

No	Bulan	Realisasi 2018 ( Rp.)	Realisasi 2017 ( Rp. )
1	Januari	1.057.295,13	1.198.552,96
2	Pebruari	1.045.594,94	2.129.920,61
3	Maret	1.177.877,91	2.012.985,69
4	April	1.294.516,07	1.929.102,62
5	Mei	1.192.942,32	1.314.313,33
6	Juni	1.132.698,29	663.314,65
7	Juli	1.217.784,84	985.432,22
8	Agustus	996.797,52	1.046.151,37
9	September	797.956,96	609.644,90
10	Oktober	797.608,86	776.582,70
11	Nopember	909.078,94	999.555,54
12	Desember	787.799,42	1.125.867,52
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.407.951,00</b>	<b>14.791.424,11</b>

Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 14.407.951,00 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama Tahun Anggaran 2018. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di *auto debet* dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp 150.613.670.106,00, realisasinya sebesar Rp 53.863.531.490,81 atau 35.76%. Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 27.475.141.649,00. Belanja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja tahun 2018.

Tabel.5.1.2 Belanja th.2018 dan tahun 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
a.	Belanja Operasi	62.735.050.914,00	27.637.198.532,00	44.05	19.475.056.178,00
b.	Belanja Modal	87.878.619.192,00	26.226.332.958,81	29.84	8.000.085.471,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>150.613.670.106,00</b>	<b>53.863.531.490,81</b>	<b>35.76</b>	<b>27.475.141.649,00</b>

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp.62.735.050.914,00 terealisasi sebesar Rp. 27.637.198.532,00 atau 44.05%, mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.162.142.354,00 dibandingkan realisasi belanja th.2017 yang besarnya Rp.19.475.056.176,00.

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut.

Tabel 5.1.3 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Pegawai	14.219.201.794,00	11.546.188.923,00	81.20	9.556.756.699,00
2	Belanja Barang dan Jasa	48.515.849.120,00	16.091.009.609,00	33.17	9.918.299.479,00
	<b>Jumlah</b>	<b>62.735.050.914,00</b>	<b>27.637.198.532,00</b>	<b>44.05</b>	<b>19.475.056.178,00</b>

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 14.219.201.794,00 dari anggaran Rp.11.546.188.923,00 atau 81.20%,Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 9.556.756.699,00, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
----	--------	-------------------------	---------------------	---	---------------------

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.561.298.994,00	3.916.186.456,00	70.42	3.870.555.699,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	8.622.640.800,00	7.605.771.467,00	88.21	5.686.201.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>14.183.939.794,00</b>	<b>11.521.957.923,00</b>	<b>81.23</b>	<b>9.556.756.699,00</b>

**b) Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa meliputi belanja bahan dan material, jasa pihak ketiga, cetak dan penggandaan, sewa-sewa, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan perjalanan dinas, Tahun 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 16.091.009.609,00 dari anggaran Rp.48.515.849.120,00 atau 33.17% mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 9.918.299.479,00.

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	841.713.288,00	678.096.500,00	80.56	280.873.550,00
2	Belanja Bahan/Material	129.564.475,00	119.526.100,00	92.25	65.288.550,00
3	Belanja Jasa Kantor	36.803.491.000,00	7.028.775.218,00	19.10	6.818.147.849,00
4	Belanja Premi Asuransi	274.147.560,00	56.517.000,00	20.62	24.495.384,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	198.300.000,00	114.931.176,00	57.96	59.262.601,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.461.500,00	179.476.700,00	95.74	108.184.950,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	176.292.000,00	128.948.000,00	73.14	84.460.000,00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	38.700.000,00	2.950.000,00	7.62	9.120.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas	1.173.100.000,00	1.146.044.815,00	97.69	533.024.758,00
10	Belanja Pemeliharaan	1.365.926.214,00	757.262.900,00	55.44	376.741.837,00
11	Belanja Honorarium PNS	4.583.640.000,00	4.153.510.000,00	90.62	727.940.000,00
12	Belanja Honorarium Non PNS	1.369.750.000,00	1.265.750.000,00	92.41	436.850.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	34.546.000,00	32.965.000,00	95.42	11.200.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi	1.319.217.083,00	411.256.200,00	31.74	380.710.000,00
15	Belanja Uang Yang diberikan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	15.000.000,00	75.00	0.00

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
	Jumlah	48.515.849.120,00	16.091.009.609,00	33.17	9.918.299.479,00

### 2. Belanja Modal

Target anggaran sebesar 87.878.619.192,00 terealisasi Rp. 26.226.332.958,81,00 atau sebesar 29.84% mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.226.247.487,81 dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.8.000.085.471,00. Komponen belanja modal sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 dan 2017

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	%	Realisasi 2017 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.386.119.192,00	25.929.602.808,81	29.67	8.000.085.471,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	275.000.000,00	271.570.150,00	98.75	0.00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	217.500.000,00	25.160.000,00	11.57	0.00
	Jumlah	87.878.619.192,00	26.226.332.958,81	28.84	8.000.085.471,00

Belanja modal secara terperinci adalah sebagai berikut :

#### 1. Belanja modal peralatan dan Mesin terdiri dari :

##### 1. Pengadaan Kendaraan Dinas

Tabel.5.1.5.1. Rincian Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2018	REALISASI 2018	
			Rp	%
1	Mobil	1,380,000,000.00	1,341,300,000.00	97.20
2	Sepeda Motor	380,000,000.00	-	-
Jumlah		1,760,000,000.00	1,341,300,000.00	76.21

#### 2. Belanja Modal Perlengkapan Kantor

Tabel 5.1.5.2. Rincian Belanja Modal Perlengkapan Kantor

No	URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan 2018	REALISASI 2018	
			Rp	%
1	Lemari Arsp	48,000,000.00	45,540,000.00	94.88
2	Meubelair	198,000,000.00	193,770,000.00	97.86
3	Alat Dapur	2,250,000.00	1,450,000.00	64.44
4	Pot Bunga	167,250,000.00	156,900,000.00	93.81
5	Meja Kerja Pejabat	401,074,800.00	168,223,000.00	41.94
6	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	100,000,000.00	96,500,000.00	96.50
7	Terali Besi	27,500,000.00	25,160,000.00	91.49
	<i>Jumlah</i>	<b>944,074,800.00</b>	<b>687,543,000.00</b>	<b>72.83</b>

3. Belanja Modal Peralatan Kantor

Tabel 5.1.5.3. Rincian Belanja Modal Peralatan Kantor

No	URAIAN	Anggaran 2018	REALISASI 2018	
			Rp	%
1	Penghancur Kertas	4,417,900.00	3,685,300.00	83.42
2	Dispenser	21,000,000.00	17,736,000.00	84.46
3	Personal Komputer	438,000,000.00	420,576,200.00	96.02
4	Peralatan Studio dan Film	861,370,600.00	203,566,000.00	23.63
5	TV LED	104,529,240.00	88,700,800.00	84.86
	<i>Jumlah</i>	<b>1,429,317,740.00</b>	<b>734,264,300.00</b>	<b>51.37</b>

4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Tabel 5.1.5.4. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

URAIAN	Anggaran 2018	REALISASI 2018	
		Rp	%
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>			
Penataan Taman Lantai 3 Gedung Kominfo	200,000,000.00	197,820,150.00	98.91
Penataan Loby Ruangan PPID	75,000,000.00	73,750,150.00	98.33
<i>Jumlah</i>	<b>275,000,000.00</b>	<b>271,570,300.00</b>	<b>98.75</b>

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan Laporan Opsional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.383.473,11 atau 16.11% dibandingkan tahun 2017 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 14.791.424,11. Realisasi Pendapatan LO Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.8. Rincian Pendapatatan LO Tahun 2018 dan tahun 2017

No	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017
1	PENDAPATAN-LO	12,407,951.00	14,791,424.11
	a. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	-	-
	b. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	12,407,951.00	14,791,424.11

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

**A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.0.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 0.00 atau 0.00% dibandingkan tahun 2017 dimana diperoleh pendapatan LO sebesar Rp. 0.00

Tabel 5.9. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Lain-lain PAD yang sah – LO	12.407.951,00	14.791.424,11
Jumlah	12.407.951,00	14.791.424,11

Saldo masing-masing jenis PAD TA. 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut.

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Penerimaan Jasa Giro – LO	12.407.951,00	14.791.424,11
Pendapatan dari Pengembalian– LO		
Jumlah	12.407.951,00	14.791.424,11

Pendapatan Jasa Giro pemegang kas tahun 2018 terealisasi Rp. 12.407.951,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.383.473,11 dibandingkan tahun 2017 yang terealisasi sebesar Rp. 14.791.424,11.

**B. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO**

Saldo Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.407.951,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.383.473,11 atau 16.11 % dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 14.791.424,11

Tabel 5.10. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2018 dan tahun 2017

No	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017
1	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah - LO	12,407,951.00	14,791,424.11
	- Pendapatan Hibah LO		

5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.Beban tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.11 .Rincian Beban tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017
<b>BEBAN</b>	<b>49,604,596,309.00</b>	<b>24,576,933,298.47</b>
Beban Pegawai	11,814,098,163.00	9,556,756,699.00
Beban persediaan	983,095,200.00	446,867,900.00
Beban Jasa	26,711,573,783.00	8,501,540,996.00
Beban Pemeliharaan	872,194,076.00	436,004,438.00
Beban Perjalanan Dinas	1,146,044,815.00	533,024,758.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8,077,590,272.00	5,102,738,507.47

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2018 terdapat beban sebesar Rp. 49.661.686.309,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.25.084.753.010,53 dari realisasi tahun 2017 Rp. 24.576.933.298,47 Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- Beban Pegawai terealisasi Rp. 11.814.098.163,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.257.341.464,00 atau 23.62 % dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 9.556.756.699,00.

Tabel 5.12. Rincian beban pegawai tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Beban Gaji dan Tunjangan	3.916.186.456,00	3.870.555.699,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	7.873.680.707,00	5.686.201.000,00



Beban Uang Lembur	24.231.000,00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>11.814.098.163,00</b>	<b>9.555.756.699,00</b>

- Beban persediaan terealisasi Rp. 983.095.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 536.227.300,00 atau 120.00% dari realisasi tahun 2017 Rp. 446.867.900,00

Tabel 5.13. Rincian beban persediaan d tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Beban Bahan Pakai Habis	683.907.400,00	273.611.900,00
Beban Persediaan Bahan /Material	119.526.100,00	65.288.550,00
Beban Cetak dan Penggandaan	179.661.700,00	107.967.450,00
<b>Jumlah</b>	<b>983.095.200,00</b>	<b>446.867.900,00</b>

- Beban jasa terealisasi Rp. 26.711.573.783,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.210.032.787,00 atau 214% dari realisasi tahun 2017 Rp. 8.501.540.996,00.

Tabel 5.14. Rincian beban jasa d tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Beban Jasa Kantor	20.644.677.583,00	6.824.765.612,00
Beban Premi Asuransi	56.517.000,00	24.495.384,00
Beban Makanan dan Minuman	128.948.000,00	86.460.000,00
Beban Pakaian Kerja	32.965.000,00	11.200.000,00
Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.950.000,00	9.120.000,00
Beban Jasa Konsultansi	411.256.200,00	380.710.000,00
Beban Honorarium PNS	4.153.510.000,00	727.940.000,00
Beban Honorarium Non PNS	1.265.750.000,00	436.850.000,00
Beban Uang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	15.000.000,00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>26.540.833.126,00</b>	<b>8.501.540.996,00</b>

Beban Pemeliharaan terealisasi Rp. 872.194.076,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 436.189.638,00 atau 100.04 % dari realisasi tahun 2017 Rp. 436.004.438.

Tabel 5.15. Rincian beban pemeliharaan tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
--------	------------	------------

Beban Pemeliharaan	757.262.900,00	376.741.837,00
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	114.931.176,00	59.262.601,00
<b>Jumlah</b>	<b>872.194.076,00</b>	<b>436.004.438,00</b>

Beban Perjalanan Dinas Rp. 1.146.044.815,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 613.020.057,00 atau 115.01% dari realisasi tahun 2017 Rp. 533.024.758,00

Tabel 5.16. Rincian beban perjalanan dinas tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	171.450.000,00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	974.594.815,00	533.024.758,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.146.044.815,00</b>	<b>533.024.758,00</b>

- Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 8.077.590.272,00 mengalami kenaikan Rp. 2.974.851.764,53 atau 58.30% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 5.102.738.507,47.

Tabel 5.17. Rincian beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	Saldo 2018	Saldo 2017
Beban Penyusutan	8.037.907.172,00	5.102.738.507,47
Beban Amortisasi	39.683.100,00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>8.077.590.272,00</b>	<b>5.102.738.507,47</b>

### 5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok.

### 5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

## 5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### 5.3.1 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.18. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2018 dan tahun 2017

URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017
EKUITAS AWAL	23,093,965,761.00	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(49,592,188,358.00)	(24,562,141,874.36)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Tetap)	1,189,264,950.95	-
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Lainnya)	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	20,195,757,410.47
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	53,851,123,539.81	27,460,350,224.89
EKITAS AKHIR	28,542,165,893.76	23,093,965,761.00

Ekuitas awal sebesar Rp. 23.093.965.761,00 yang merupakan saldo ekuitas th. 2017.

Surplus/Defisit LO terealisasi Rp.(49.592.188.358,00) mengalami kenaikan dari realisasi th. 2017 sebesar Rp. (24.562.141.874,36).

Koreksi ekuitas lainnya (Aset Tetap) sebesar ( Rp. 1.189.264.950,95) terdiri dari :

Uraian	Rp.
Jaringan Fiber Optik	111.503.700,00
Kendaraan Bermotor Penumpang	217.250.000,00
Alat Kantor Lainnya	7.623.000,00
Meubelair	340.970.229,95
Meja Kerja Pejabat	69.299.050,00
Meja Rapat Pejabat	27.499.830,00
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	20.019.430,00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	575.627.340,00
Lemari dan Arsip Pejabat	50.599.620,00
Peralatan Studio dan Film	180.270.000,00
Personal Komputer	48.934.000,00
Alat Dapur	460.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.750.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	155.695.833,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	16.816.606,00
Akumulasi Penyusutan Meja Kursi Kerja/Rapat Pejabat	590.320,00
Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	659.990,00
Bangunan Gedung Kantor	207.608.500,00
Bangunan Gedung Kantor	73.750.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.189.264.950,95</b>

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2018 sebesar Rp. 53.851.123.539,81 mengalami kenaikan sebesar Rp. 26.390.773.314,92 dari saldo tahun 2017 sebesar Rp.27.460.350.224,89.

Ekuitas Akhir tahun 2018 sebesar Rp. 28.546.612.936,76 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.452.647.175,76 dari saldo tahun 2017 Rp. 23.093.965.761,00

### 5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas. Berikut Total Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018 dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebagai berikut:  
Komponen Aset terdiri dari :

			2018		2017
5.1.9	ASET	Rp.	0.00	Rp.	0.00
	Aset Lancar	Rp.	0,00	Rp.	0.00
	a.Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0.00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018, yang terdiri dari Sisa Kas (Uang Persediaan/UP ) di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2018 yang telah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yaitu STS UP Nomor:

003/Bend.Pengeluaran Diskominfo/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 437.641.760,00 (Fotocopy STS terlampir).

Sehingga saldo Bank Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 009.010.5001910 sebesar Rp. 0,00

**b.) Persediaan Tahun 2018 Rp 1.483.250,00**

Rincian Persediaan tahun 2018 sebagai berikut

Tabel.5.19. Rincian Persediaan tahun 2018 dan tahun 2017

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 31 Des 2017	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2018
			Tambah ( Rp.)	Kurang ( Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	2,221,650.00	400,750.00	2,221,650.00	400,750.00
2	Barang Cetak	217,500.00	32,500.00	217,500.00	32,500.00
3	Bahan Bakar	4,830,000.00	0.00	4,830,000.00	0.00
4	Perangko,Materai	210,000.00	1,050,000.00	210,000.00	1,050,000.00
Jumlah		7,479,150.00	1,483,250.00	7,479,150.00	1,483,250.00

Persediaan di Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 400.750,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 2.221.650,00.
2. Persediaan Barang Cetak sebesar Rp. 32.500,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 217.500,00.
3. Persediaan Bahan Bakar sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 4.830.000,00.
4. Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp 1.050.000,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 210.000,00.

**2. Aset Tetap Rp 99.084.110.585,72**

Saldo aktiva tetap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018 sebesar Rp 99.084.110.585,72

**a) Tanah Rp. 0,00**

**b) Peralatan dan Mesin Rp. 77.339.679.504,42**

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 77.339.679.504,42 mengalami peningkatan dari tahun 2017 dengan saldo Rp. 32.921.158.772,47

Penambahan Peralatan dan Mesin tahun 2018 sebesar Rp77.339.679.504,42 diperoleh dari Belanja Modal yang sudah terealisasi pembayarannya selama Tahun 2018 sebesar Rp. 25.929.602.808,81; Belanja Modal Tahun 2018 (Hutang) Rp. 55.312.438.682,96; Belanja Non Modal sebesar Rp. 229.204.000,00; Pembayaran Bunga Atas Keterlambatan Rp. 241.275.589,00 dan Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 1.308.888.499,95. Pada tahun 2018 juga terjadi kapitalisasi aset sebesar Rp. 5.210.000,00 dan Koreksi (Penyesuaian) sebesar Rp. 38.597.678.848,77 yang mengurangi jumlah nilai peralatan dan mesin.

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2018 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Komunikasi dan Imnformatika Kabupaten Badung periode 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, terinci sebagai berikut.

Tabel 5.20. Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2018

Saldo Akhir	Rp	77,339,679,504.42	Rp	32,921,158,772.47
	Tahun 2018		Tahun 2017	
Saldo Awal				
- Peralatan dan Mesin	Rp	32,921,158,772.47	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	25,929,602,808.81	Rp	8,000,085,471.00
- Belanja Modal (Hutang)	Rp	55,312,438,682.96		
- Non Belanja Modal	Rp	229,204,000.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	1,308,888,499.95	Rp	25,110,357,925.47
- Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran	Rp.	241,275,589.00		
Jumlah	Rp	83,021,409,580.72	Rp	33,110,443,396.47
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	38,597,678,848.77		
- Kapitalisasi	Rp	5,210,000.00	Rp	189,284,624.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	38,602,888,848.77	Rp	189,284,624.00
Jumlah	Rp	77,339,679,504.42	Rp	32,921,158,772.47

c) Gedung dan Bangunan Rp. 1.612.112.638,08

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 1.612.112.638,08 yang mana mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang bersaldo Rp.0,00. Hal ini disebabkan karena adanya penyerahan hasil pekerjaan belanja modal.

Tabel 5.17 Rincian Gedung dan Bangunan Tahun 2018

Saldo Akhir	Rp	1,612,112,638.08	Rp	-
		Tahun 2018		Tahun 2017
Saldo Awal				
- Gedung dan Bangunan	Rp	-	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	1,893,471,138.08	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	1,893,471,138.08	Rp	-
Pengurangan				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	281,358,500.00		
- Kapitalisasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	281,358,500.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	1,612,112,638.08	Rp	-

**d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp. 38.781.354.112,69**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 38.781.354.112,69 yang artinya mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 Rp. 188.918.250,00. Berikut rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018.

Tabel 5.18 Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2018 dan tahun 2017

Saldo Akhir	Rp	38,781,354,112.69	Rp	188,918,250.00
		Tahun 2018		Tahun 2017
Saldo Awal				
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	188,918,250.00	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	38,382,743,010.69	Rp	-
	Rp	209,692,852.00	Rp	0.00
- Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran		0.00	Rp	188,918,250.00
Jumlah	Rp	38,592,435,862.69	Rp	188,918,250.00
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0.00		
- Kapitalisasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	38,781,354,112.69	Rp	188,918,250.00

**e) Aset Tetap Lainnya Rp 96.316.000,00**

Saldo aset tetap lainnya pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2018 sebesar Rp 96.316.000,00 atau tidak mengalami perubahan

dibandingkan tahun 2017. Berikut rincian aset tetap lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018.

Tabel.5.20 Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018

Saldo Akhir	Rp	96,316,000.00	Rp	96,306,000.00
	Tahun 2018		Tahun 2017	
Saldo Awal				
- Aset Tetap Lainnya	Rp	96,316,000.00	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	-
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0.00	Rp	96,306,000.00
Jumlah	Rp	-	Rp	96,306,000.00
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	0.00		
- Kapitalisasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalan Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	96,316,000.00	Rp	96,306,000.00

f) **Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 0,00**

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan Pada Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2017 (Rp. 380.710.000,00) karena konstruksi tersebut sudah selesai pengerjaanya pada Tahun 2018.

Tabel 5.21 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2018 dan tahun 2017



Saldo Akhir	Rp	-	Rp	380,710,000.00
		Tahun 2018		Tahun 2017
Saldo Awal				
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	380,710,000.00	Rp	-
Penambahan				
- Belanja Modal	Rp	-	Rp	380,710,000.00
- Non Belanja Modal	Rp	0.00	Rp	0.00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	0.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	380,710,000.00
Pengurangan				
- Penghapusan peralatan dan mesin				
- Koreksi ( Penyesuaian)	Rp	380,710,000.00		
- Kapitalisasi	Rp	0.00	Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)	Rp	0.00		
- Pengembalian Mobil			Rp	0.00
- Koreksi (ekstra)			Rp	0.00
Jumlah	Rp	380,710,000.00	Rp	0.00
Jumlah	Rp	-	Rp	380,710,000.00

**f). Akumulasi Penyusutan Rp. (18.745.351.669,47)**

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 sebesar Rp. (18.745.351.669,47) mengalami kenaikan dibandingkan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.533.681.748,47. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagaiberikut:

NO	URAIAN	NERACA 31 Des 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2018	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2017
1	Tanah	0.00	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	77,339,679,504.42	18,399,554,906.47	10,453,083,507.47
3	Gedung dan Bangunan	1,612,112,638.08	5,373,708.00	0.00
4	Jalan Irigasi Jaringan	38,781,354,112.69	340,423,055.00	80,598,245.00
5	Aset Tetap Lainnya	96,316,000.00	0.00	0.00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0.00
Jumlah		117,829,462,255.19	18,745,351,669.47	10,533,681,752.47

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2018 terlampir)

**3. Aset Lainnya Rp. 0,00**

- a) Tagihan Jangka Panjang Rp. 0,00
- b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp. 0,00
- c) Aset Tidak Berwujud Rp. 0,00
- d) Aset Lain-lain Rp. 0,00

Dibandingkan dengan Tahun 2018, Aset Tak Berwujud mengalami penurunan sebesar Rp 39.683.100,00 karena adanya amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 39.683.100,00 sehingga saldo Aset Tak Berwujud pada neraca per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00.

**5.1.10 KEWAJIBAN Rp 70.543.427.941,96**

1)	Kewajiban Jangka Pendek	Rp. 70.543.427.941,96
	Kewajiban jangka pendek terdiri dari :	

- |    |                                    |                       |
|----|------------------------------------|-----------------------|
| a) | Utang PFK                          | Rp. 0,00              |
| b) | Utang Bunga                        | Rp. 0,00              |
| c) | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | Rp. 0,00              |
| d) | Pendapatan Diterima Dimuka         | Rp. 0,00              |
| e) | Utang Beban                        | Rp. 14.341.397.809,00 |

Saldo utang beban per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 14.341.397.809,00, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dimana saldo utang beban sebesar Rp. 6.617.763,00. Rincian utang beban per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

NO	URAIAN	2018	2017
1	Belanja Telepon	299,167.00	0.00
2	Biaya Listrik CCTV	8,620,961.00	6,617,763.00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif	7,524,000.00	0.00
4	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinamis Triwulan IV	246,247,275.00	0.00
5	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Dinamis (Absensi Tgl 20 s/d 31 Des 2018)	14,137,965.00	0.00
6	Utang Beban Barang Jasa (Bunga atas keterlambatan pembayaran utang pengadaan belanja modal Peralatan Comand Center dan Data Center 2018)	232,150,234.00	0.00
7	Pembayaran Belanja Kawat Faximili/Internet/TV Kabel/TV Satelit keg. Penyediaan Akses Internet	13,613,600,000.00	0.00
8	Utang Beban barang Jasa ( Bunga Atas keterlambatan Pembayaran Utang Pemasangan Jaringan Fiber Optik di Kawasan Puspem Badung)	13,966,565.00	0.00
9	Utang Beban Barang Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Studio Film, Sound System Ruang Rapat Lantai II, Layar Monitor, LCD+Layar Proyektor Tahun 2018)	5,335,155.00	0.00
10	Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Jasa Konsultansi dan Pengawasan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV di Kab. Badung 2018)	2,424,725.00	0.00
11	Utang Beban Barang dan jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Jasa Konsultansi dan Pengawasan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Akses Internet di Kab. Badung 2018)	6,471,190.00	0.00
12	Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua Tahun 2018)	3,790,200.00	0.00
13	Utang Beban Barang dan Jasa (Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Utang Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung Tahun 2018)	186,830,372.00	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>14,341,397,809.00</b>	<b>6,617,763.00</b>

f) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp. 56.202.030.132,96

Saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 56.202.030.132,96,00; mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dimana utang beban tercatat Rp. 0,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	2018	2017
1	Pengadaan Belanja Command Center dan Data Center di Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018	23.215.023.443,00	0.00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film (Sound System Untuk Ruang Rapat Lantai II. Sound System Untuk Ruang Rapat Lt. III., Layar Monitor Untuk Ruang RapatLt. III, LCD+Layar Proyektor	533.515.500,00	0.00
3	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	379.020.000,00	0.00
4	Pemasangan Jaringan Fiber Optikdi Kawasan Puspem Badung	1.396.656.459,00	0.00
5	Kegiatan Pengembangan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	11.105.186.061,21	0.00
6	Belanja Modal Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	18.683.037.219,75	0.00
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung	242.472.450,00	0,00
8	Pengadaan dan Pengawasan Jaringan CCTV pada Kawasan Strategis di Kabupaten Badung Belanja Jasa Konsultansi Kegiatan Penyediaan Akses Internet di Kabupaten Badung	647.119.000,00	0.00
	Jumlah	56.202.030.132,96	0.00

2). Kewajiban Jangka Panjang Rp. 0,00

- a) Utang Dalam Negeri Rp. 0,00
- b) Utang Luar Negeri Rp. 0,00

5.1.11 EKUITAS Rp. 28.542.165.893,76

1). Ekuitas Rp. 28.542.165.893,76

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung per 31 Desember 2018 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 28.542.165.893,76 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar Rp. 23.093.965.761,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	23,093,965,761.00	0.00
SURPLUS/DEFISIT LO	(49,592,188,358.00)	(24,562,141,874.35)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Tetap)	1,189,264,950.95	0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Lainnya)	0.00	0.00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0.00	20,195,757,410.47
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	53,851,123,539.81	27,460,350,224.89
EKUITAS AKHIR	28,542,165,893.76	23,093,965,761.00

Koreksi ekuitas lainnya (aset tetap) pada tahun 2018 tercatat Rp 1.189.264.950,95 yang berasal dari mutasi aset tetap antar OPD, akumulasi penyusutan aset tetap dan penambahan nilai aset tetap dari belanja jasa konsultansi dan pengawasan pengadaan belanja modal dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Debet	Kredit
1.	Penambahan Nilai Aset Tetap dari Belanja Jasa Konsultansi dan Pengawasan Kegiatan Pemasangan Fiber Optik Tahun 2018		111.503.700,00
2.	Mutasi Kendaraan Dinas Roda Empat dari Sekretariat Daerah		217.250.000,00
3.	Mutasi Papan Struktur dari Sekretariat Daerah		7.623.000,00
4.	Mutasi Mebelair dari Dinas PUPR		340.970.229,95
5.	Mutasi Meja Kerja Pejabat dari Dinas PUPR		69.299.050,00
6.	Mutasi Meja Rapat Pejabat dari DinasPUPR		27.499.830,00
7.	Mutasi Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat dari Dinas PUPR		20.019.430,00
8.	Mutasi Kursi Tamu di Ruangan Pejabat dari Dinas PUPR		575.627.340,00
9.	Mutasi Lemari dan Arsip Pejabat dari Dinas PUPR		50.599.620,00
10.	Penambahan Nilai Aset Tetap (Peralatan Studio Video dan Film) dari Belanja Jasa Konsultansi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaaan Peralatan Command Center Tahun 2018		180.270.000,00
11.	Penambahan Nilai Aset Tetap (Personal Komputer) dari Belanja Jasa Konsultansi dan Pengawasan Kegiatan Pengadaan Mesin Absensi Tahun 2018		48.934.000,00
12.	Pengurangan Aset Tetap (Alat Dapur - Kompor) karena merupakan barang ekstra kompatabel	460.000,00	
13.	Pengurangan Aset Tetap (Alat Rumah Tangga Lainnya - Home Use - tong sampah) karena merupakan barang ekstra kompatabel	4.750.000,00	
14.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	155.695.833,00	
15.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	16.816.606,00	
16.	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	590.320,00	
17.	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	659.990,00	
18.	Mutasi Aset Tetap (ruang rapat Sekda) ke Sekretariat Daerah	207.608.500,00	
19.	Mutasi Aset Tetap (Penataan Lobby PPID) ke Dinas PUPR	73.750.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	460.331.249,00	1.649.596.199,95

## **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 7 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang menyatakan mandat yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Komunikasi dan Informatika. Struktur Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung terdiri dari :

1. 1 ( satu ) orang Kepala Dinas
2. 1 ( satu ) orang Sekretaris
3. 5 ( lima ) orang Kepala Bidang
4. 15 ( lima belas ) orang Kepala Seksi
5. 3 ( tiga ) orang Kepala Sub Bagian
6. 40 ( empat puluh ) orang staf
7. 86 ( delapan puluh enam ) orang Tenaga Kontrak.

## **BAB VII**

### **KESIMPULAN PENTING TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

Sebagai akhir dari Laporan Catatan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran setelah Perubahan tahun 2018 yang direncanakan dapat direalisasikan atau dilaksanakan dengan prosentase capaian program pada BAB V diatas.

Program-program yang dilaksanakan capaian rata-rata pencapaian fisik 100 % sedangkan realisasi keuangannya rata-rata sebesar 90,82% diantaranya :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran telah dapat terlaksana dengan baik yakni dengan lancarnya pelaksanaan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yakni untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangandiarahkan untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan SKPD dan capaian realisasi keuangan.
3. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD dimaksudkan untuk tercapainya pelaksanaan tugas dengan baik dengan dukungan data yang akurat.
4. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan untuk mempercepat informasi dan peningkatan penguasaan teknologi dalam pelayanan kepada masyarakat.
5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dalam Penyerapan Informasi Media.
6. Program Pengelolaan Persandian Daerah
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan



Informatika ini dibuat sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tahun Anggaran 2018 yang berbasis AkruaI dimana Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

